

**PERANCANGAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
INFORMASI ADMINISTRASI PADA KANTOR DESA
AMPELDENTO, KECAMATAN KARANGPLOSO, KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen

MANAJEMEN



OLEH :

YOLGA TERCIN ROSNI

NIM : 2018120067

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

PRODI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2022

**PERANCANGAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN INFORMASI
ADMINISTRASI PADA KANTOR DESA AMPELDENTO, KECAMATAN
KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG.**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Totok Sasongko¹
Dosen Pembimbing Muhammad Fauzy Emqi²
Dosen Penguji Fendiyatmi Kusufa³**

ABSTRAK

Riset berikut mempunyai tujuan untuk mengetahui Perancangan sistem pengelolaan keuangan dan informasi administrasi pada Kantor Desa Ampeldento pada tahun 2021 dan kesiapan aparat pemerintah pemerintah desa terhadap perancangan sistem pengelolaan dan informasi administrasi desa berdasarkan UU RI No. 6 Tahun 2014 terkait Desa, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan informasi administrasi. Metode yang dipakai pada riset ini ialah metode kualitatif untuk mengumpulkan data menggunakan cara wawancara dengan 6 informan (Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara, Ketua BPD, dan Masyarakat), Observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, pengajian data. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa perancangan sistem pengelolaan keuangan dan informasi administrasi pada tahun 2021 yaitu keuangan di Desa Ampeldento terdiri dari empat sumber ialah DD, Alokasi DD, PBH dan Pendapatan Asli Kantor Desa Ampeldento. Dalam pengelolaan Keuangan desa harus dikelola secara efektif terhadap peraturan Undang-Undang yang dapat diuraikan bentuk perancangan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan. informasi administrasi desa dapat membantu masyarakat dalam menemukan informasi lebih cepat sehingga dapat meningkatkan kualitas desa dan cukup bermanfaat bagi masyarakat Desa Ampeldneto, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Informasi Administrasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Arif Susanto dan Anteng Widodo (2017), lahirnya UU No.6 Tahun 2014 terkait Desa yang di tunggu penuh suka cita oleh pemerintah dan masyarakat yang membuat Desa cukup kuat dan lebih mandiri dalam menjalankan jobdesk PEMDA pada pengelolaan DD. Desa ialah kata kunci yang sangat penting untuk mengandung konsekuensi dalam perancangan dan pengelolaan keuangan dan informasi administrasi untuk digunakan kemandirian desa. Dan sisi ekonomi desa dapat mengalokasikan perancangan sistem keuangan desa guna untuk yang lebih akurat dan akuntabilitas. Sedangkan konsekuensinya untuk meluaskan kebijakan yang diperoleh desa. Undang-Undang desa dapat melakukan reformasi keuangan Desa. Begitu pula Kantor Desa Ampeldento sangat mengharapkan perkembangan sistem informasi administrasi. Pengelolaan data administrasi keuangan pada Kantor Desa Ampledento merupakan kegiatan penting yang dapat melakukannya setiap saat, Data-data keuangan yang selalu dapat berubah setiap bulan dan setiap tahun baik pemasukan dan pengeluaran. Dalam pengelolaan informasi dituntut aktual. Sehingga diperlukan sistem informasi yang dapat mengolah data secara tepat dan efektif. Banyak orang yang memaksimalkan media sosial sebagai trend yang positif apalagi saat pandemic Covid19 yang mampu mengubah dari beberapa segi kehidupan secara keseluruhan, (Muhammad Fauzy Emqi dan Riantina Fitra Aldya). Desa yang besar dapat mewujudkan potensi dan tantangan yang akurat pada desa. Desa dituntut untuk mampu melaksanakan tata kelola keuangan yang mulai dari perancangan, Pengelolaan, Pengawasan dan Tanggungjawab. Kompetensi yang harus dimiliki pemerintah desa, Sehingga desa dapat terhindar dari kasus pidana yang menjadi kekhawatiran banyak pihak.

Muhammad Yusuf, Romandhon, M. Elfan Kaukab (2020) Dalam Desa memiliki dana Desa yang harus dipertimbangkan yang memberikan kepastian hukum terhadap dana Desa. Harapan yang dilaksanakan bukan hanya sebagai sekedar objek penerimaan manfaat atau subjek pemberian terhadap masyarakat Desa. DD sangat berperan penting dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan pencapaian terhadap pengelolaan DD, cobaan yang menerpa pada desa merupakan penyerapan pelaksanaan dana Desa yang terlambat, sehingga penggunaan dana Desa yang kurang efektif. Pengelolaan keuangan berupa estimasi planning, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap keuangan Desa. Uang desa ialah nilai pertama yang berupa tahapan awal terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut. Planning keuangan desa bisa digunakan untuk merancang penyusunan APBDes dengan baik dan benar. keberhasilan Desa terlihat dari cara pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan keuangan desa, keberhasilan seorang pemimpin pada suatu kegiatan bisa dikoreksi dari semakin meningkat yang signifikan terhadap pekerjaan yang diperankan padanya. (Fendiyatmi Kusufa.2019)

PEMDA harus mempunyai usaha untuk melakukan transparansi dan kejujuran terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa bisa diaktakan bagus ketika sudah memenuhi kriteria dari PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 terkait panduan saat melakukan pengelolaan keuangan (Ramadhan. 2014:3). Langkah awal yang harus dilakukan oleh PEMDA ialah mengelola laporan keuangan. Diantara sumber penghasilan dari sebuah desa yang mempunyai fungsi tersendiri yaitu adalah Alokasi DD (Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Sudarno, Taufik Kurrohman. 2016)

Menurut T. Fitrawan Mondale, Aliamin, dan Heru Fahlevi (2017). Desa ialah bentuk satu kesatuan dari hukum yang memiliki struktur Desa. Sebagai bentuk pencapaian daripada pengelolaan keuangan Desa, PEMDA didesak untuk segera membuatkan

perancangan sebelum melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan UU. Dalam pengelolaan keuangan desa yang mengikuti pengelolaan daerah dimana kepala desa berperan penting dan bertanggung jawab terhadap kekuasaan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Dalam pertanggung jawaban setiap tahun PEMDA melakukan pengelolaan keuangan desa setiap 1 periode sekali yang mana pemaparannya kepada bupati dan bagian dari Desa. Seringkali yang terjadi didalam desa adalah sebagian besar masalah yang terkait tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

Menurut Painem dan Achmad Solichin (2015). Diperlukan suatu sistem informasi administrasi yang akurat yang mampu mengatasi seluruh kendala dan masalah yang ada dalam desa. Karena terdapat data-data yang masih dalam bentuk konvensional yaitu kemungkinan disimpan dalam bentuk arsip sehingga data bisa hilang dan rusak. Dalam pembuatan sistem informasi administrasi ini didukung dengan terdapatnya data-data pendukung seperti berkas-berkas yang dalam bentuk arsip, kemungkinan terjadinya kerusakan dan hilang. Sistem informasi administrasi yang interaksi dalam membentuk informasi yang dapat membentuk pembuatan keputusan dalam pengelolaan perencanaan administrasi Desa. Dalam administrasi dapat melakukan mencatat ataupun menyusun beserta informasi yang efisien mungkin dengan tujuan memberikan keterangan untuk mempermudah penyusunan informasi administrasi dalam membentuk suatu kesatuan untuk mengintegrasikan data serta memproses dan menyimpan seluruh data yang ada dalam desa. Informasi yang pragmatik dan realistik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam skala kepentingan yang telah ditentukan dan upaya pengembangan kemampuan dibidang administrasi yang sesuai dengan keinginan desa lokal dan pada lingkungan yang tidak bertentangan dengan kebijakan, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, (Totok Sasongko,2011).

Kantor Desa Ampeldento terletak di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dan dibatasi empat desa tetangga. Di ujung utara berseberangan dengan desa Ngijo, di ujung barat bersebelahan dengan desa Girimoyo, sedangkan ujung sebelah selatan dengan desa Tegal Gondo, sebelah timur dengan desa Kapuharjo. Desa Ampeldento terbagi terbagi menjadi empat wilayah dusun yaitu dusun Jemput, dusun Bunder, dusun Kasin, dan dusun Kasin Putuk. Menurut pengamatan awal yang dilakukan dengan cara wawancara, untuk sumber pemasukan uang di Kantor Desa Ampeldento terdiri dari empat sumber yaitu DD, Alokasi DD, PBH dan Pendapatan Asli Kantor Desa Ampeldento. Pengelolaan keuangan desa harus dibuat setiap tahun untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan terhadap dana desa untuk mengetahui dana yang diperlukan untuk didanai dan dana desa yang tidak diperbolehkan untuk didanai. Maka pengeluaran keuangan di desa ampeldento terbagi dalam beberapa produk domestik desa/kelurahan bruto. Dalam informasi administrasi pada desa sangat berpengaruh penting terhadap untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang ada di dalam Desa. Penelitian untuk mengetahui tingkat perancangan pengelolaan keuangan yang ada di Kantor Desa Ampeldento (Sumber dari bapak Faris sekretaris desa). Melalui pemaparan latar belakang yang sudah terurai, sehingga ada ketertarikan untuk meneliti yang berjudul **“PERANCANGAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN INFORMASI ADMINISTRASI PADA KANTOR DESA AMPELDENTO, KECAMATAN KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Pemaparan diatas membuat penulis merumuskan masalah untuk membatasi subjek penelitian ini:

1. Bagaimana perancangan sistem pengelolaan keuangan pada Kantor Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?

2. Bagaimana saja kegiatan informasi administrasi Pada Kantor Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat perancangan sistem pengelolaan keuangan pada Kantor Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?
4. Apa Saja Faktor Pendukung dan penghambat informasi Administrasi Pada Kantor Desa Ampeldento?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah yang sudah dipaparkan maka peneliti menarik tujuan menjadi beberapa bagian seperti berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perancangan sistem pengelolaan keuangan pada Kantor Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
2. Untuk mendeskripsikan Informasi Administrasi Pada Kantor Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat perancangan sistem pengelolaan keuangan pada Kantor Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat informasi Administrasi Pada Kantor Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan lain dari seorang penulis skripsi ini, mempunyai beberapa manfaat diantara:

1. Secara teoritis

Riset ini mampu bisa digunakan bahan proporsi dan juga sumbangsih intelektual sebagai pelengkap teori yang sefrekuensi dan mampu menegmbangkan ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis

Riset kali sebagai saran yang positif terhadap pemerintah dan masyarakat yang berjuang dan mengupayakan peningkatan planning pada sistem pengelola keuangan dan informasi administrasi pada Desa Ampeldento.

3. Manfaat Akademis

Untuk peneliti sangat membantu dalam memperluas ilmu pengetahuan serta mampu kajian ilmu yang selama ini berada di bangku perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kadir. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Andi.Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. dkk. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng*. Jawa Timur: Kabupaten Lumajang.
- Fauzy, Emqi Muhamad & Fitra, Aldya Riantina. 2021. *Pengembangan Potensi Diri Dalam Pembelajaran Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kepustakaan Buku “Malas Tapi Sukses” Karya Fred Gratzon)*. Jurnal. Universitas Tribhuwana Tungadewi: Malang.
- Fendiyatmi, K. 2019. *Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan*. PT. Penerbit Erlangga Cabang Malang.
- Fitrawan, T Mondale dkk. 2017. *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak ii, Kabupaten Aceh Tengah)*. **Jurnal**. Vol. 3, No. 2, Hlm. 196-212.
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasana,S.Enung, N.& Dendi P.2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan*. Program Studi Akuntansi Universitas Kuningan.
- Hidayat, Taufik., dan Istiadah Nina. 2011. *Panduan Lengkap Menguasai SPSS 19 Untuk Mengelola Data Statistik Penelitian*. Jakarta: Mediakita
- Kurniati, A.Sadikin,S.Kom,M.S.I, & Beni Irwan,S.Kom.M.S.I.2019 *Perancangan System Administrasi Kependudukan (SIK) Berbasis Web Pada Kelurahan Sungai Bengkal*.Universitas Adiwangsa Jambi.
- ParayantA, DKK. 2017.*Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan*. STMIK AUB Surakarta.
- Prasetyo, T. & R P Dhaniawaty.2020.*Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa Pada Desa Cilayung Kabupaten Kuningan*. Jurnal Teknologi dan Informasi.Bandung.
- Rahmawaty, D.A & Azizah F. 2020. *Sistem Administrasi Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Berbasis Web*. Jurnal Teknik Elektro.Surakarta : Indonesia
- Risnaningsih. 2017. *Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept*. Jurnal Analisis Akuntansi dan Perpajakan: Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

- Rusmayanti, Atik.dkk. 2014. *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Ngadirejan*. UNSA. Surakarta.
- Sasongko, Totok. 2011. *Pola Sistem Informasi Manajemen Bidang Akademik*. Jurnal Jurusan Ekonomi. Universitas Tribhuwana Tungadewi: Malang
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Jakarta.
- Supriadi, E.2015.*Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS.
- Susanto, Arif dan Widodo, Anteng. (2017). *Analisi dan perancangan system Informasi keuangan desa berbasis web*. Jawa Tengah: universitas muria kudas Gondang manis.
- Suwarno. 2019. *Pengelolaan Keuangan Desa: Perancangan Sampai Dengan Pertanggungjawaban Pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas*. Jawa Tengah: Jurnal Akuntansi dan perpajakan.
- Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Penerjema J-Smith D. F. M. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia N0.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Yusuf,M.Romandon & M.Elfan Kaukab.2020. *Analisis Perancangan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Capital. Universitas Sains Al-qur'an